

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PNS
MENGUNAKAN REKENING SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI PT
BPRS HAJI MISKIN CAB. PAYAKUMBUH**

Dea Oktavia¹, Habibatur Ridhah², Iiz Izmuddin³, Himmatul Khairi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Email : deaokta281002@gmail.com¹, ridhah@live.com², iizizmuddin@iainbukittinggi.ac.id³,
himmatulkhairi@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis manajemen risiko pembiayaan PNS menggunakan rekening sebagai alat pembayaran di PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh. BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan penting meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi menghadapi tantangan dari bank konvensional dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan risiko nasabah PNS yang muncul diantaranya risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan pembayaran akibat beberapa faktor yang dialami nasabah, dan risiko operasional merupakan risiko yang muncul akibat kesalahan atau kelalaian sistem operasi pada bank, dengan begitu solusi manajemen risiko yang dilakukan PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh cukup baik mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan PT BPRS Haji miskin Cab. Payakumbuh juga meningkatkan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran nasabah dalam pembayaran pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah sendiri, dan untuk bank harus meningkatkan kehati-hatian dan pengawasan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, serta melakukan pengecekan sistem operasional dan keperluan perbankan dengan optimal.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan PNS.

Abstract

The study aims to analyze the risk management of civil servant financing using accounts as a means of payment at PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh. BPRS as a sharia financial institution that plays an important role in improving the community's economy but faces challenges from conventional banks and low public understanding of the sharia system. The research method is descriptive qualitative where data collection techniques are through interviews, observations and documentation, while for data analysis using data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the risks of civil servant customers that arise include financing risks, namely the risk of payment failure due to several factors experienced by customers, and operational risks are risks that arise due to errors or negligence in the bank's operating system, so that the risk management

solution carried out by PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh is quite good covering risk identification, risk measurement, risk monitoring, risk control and PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh also improves the 5C analysis (character, capacity, capital, collateral, condition). This study recommends increasing customer awareness in paying problematic financing made by customers themselves, and banks must increase caution and supervision in providing financing to prospective customers, as well as conducting checks on operational systems and banking needs optimally.

Keywords: Risk Management, Civil Servant Financing.

PENDAHULUAN

Bank merupakan organisasi/lembaga sektor keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 3 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut dengan UU Perbankan Syariah menyatakan harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah/islam, tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, menggunakan objek yang haram, dan dapat menimbulkan suatu bentuk kedzaliman, serta bisa menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Keberadaan bank syariah sangat berpengaruh di masyarakat karena dapat mengatasi masalah mengenai adanya pengenaan bunga, hal ini disebabkan sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang fluktuatif sehingga merugikan akibat perubahan tingkat suku bunga dapat

dihindari, hal ini terbukti setelah bank syariah eksis dalam dunia perbankan Indonesia pada masa krisis moneter tahun 1998.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan bentuk hukum perbankan syariah adalah perseroan terbatas (PT). Kegiatan BUS dan BPRS meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembiayaan adalah serangkaian kegiatan lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat dimana hasil dari suatu pembiayaan berupa

bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati/ditetapkan. Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7 berbunyi:

....لَا يَكُنْ دُولَةً الْأَغْنِيَا عَيْنَيْنِ مُنْكَمُ....

Artinya : ...*(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...*

Dari penjelasan ayat diatas sebagai pengarah kerkayaan tidak boleh beredar di tangan orang-orang kaya saja tetapi juga menjangkau mereka yang membutuhkan. Disini lah tujuan sebenarnya dari kegiatan perbankan yaitu bank mengumpulkan dana dari orang yang memiliki kelebihan dana selanjutnya bank sebagai lembaga yang mengelola dana menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Ayat tersebut menerangkan kaum

muslim harus saling membantu saudaranya yang kesulitan dan menciptakan kesejahteraan di kalangan muslim.

Dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan dianalisis untuk menentukan faktor yang mempengaruhi layak atau tidaknya pembiayaan tersebut. Dalam hal ini manajemen perusahaan harus ahli atau handal mengatur strategi untuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah, hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat dari organisasi atau bank tertentu. Analisis dilakukan sebagai rangka memperhitungkan risiko-risiko dalam suatu pembiayaan, tujuannya untuk menghindari timbulnya risiko yang dapat merugikan pihak bank

Pada PT. BPRS Haji Miskin ada satu pembiayaan yang unik diterapkan yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai pemenuhan segala

kebutuhan, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Setiap pemberian pembiayaan oleh bank membutuhkan suatu jaminan. Jaminan merupakan kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Pada PT. BPRS Haji Miskin pembiayaan PNS jaminan yang harus ada berupa SK PNS/ijazah nasabah PNS, Rekening Gaji, Surat izin dari atasan, dan syarat lainnya yang harus diisi.

PT BPRS Haji Miskin ialah salah satu lembaga keuangan bank berbentuk BPRS dalam menjalankan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tidak memiliki jasa lalu lintas pembayaran, PT BPRS Haji miskin menawarkan bermacam banyak produk pembiayaan salah satunya pembiayaan untuk PNS, pembiayaan PNS ini banyak macam tapi yang peneliti lakukan pada penelitian ini khusus untuk PNS sertifikasi, pembiayaan ini berjalan atau dilangsungkan sudah lebih kurang 7 tahun semenjak 2018, sertifikasi merupakan sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional, sertifikasi ini bisa berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi

yang didapatkan dari lembaga pelatihan sesudah lulus ujian kompetensi yang diadakan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Pembiayaan sertifikasi di BPRS Haji Miskin diberikan untuk melihat apakah produk sertifikasi dapat berjalan baik di Sumatera Barat, produk ini sudah banyak dilakukan di Jawa dan sekitarnya dengan nama perusahaan Dumi yang terlebih dahulu memperkenalkan produk pembiayaan sertifikasi kepada guru/PNS, dari situ BPRS Haji Miskin memulai untuk memasarkan produk sertifikasi ini, banyak PNS tertarik melakukan pembiayaan sertifikasi di BPRS Haji Miskin sampai saat ini. Setiap gaji PNS masuk atau cair akan langsung dipotong oleh karyawan bank sesuai jumlah pembiayaan yang disepakati dengan memindahkan saldo pembiayaan nasabah PNS ke rekening perusahaan, hal ini biasa dilakukan setiap tanggal 1 di BPRS Haji Miskin. Berdasarkan hasil survey data awal BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh informasi data jumlah nasabah Pembiayaan PNS (pegawai negeri Sipil) yang penulis dapatkan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pembiayaan PNS

No	Tahun	Jumlah Nasabah PNS	Baki Debet
1	2021	155 Orang	Rp. 16.700.676.781
2	2022	223 Orang	Rp. 19.174.807.797
3	2023	254 Orang	Rp. 22.894.787.871
Jumlah		632 Orang	Rp. 57.770.272.449

Sumber : PT. BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh

Dalam tabel 1 dapat dilihat jumlah nasabah pembiayaan untuk PNS tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan terus-menerus, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah nasabah sebanyak 68 orang, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan tetapi hanya 31 orang, akan tetapi hal ini membuat jumlah nasabah pembiayaan PNS di BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh tetap meningkat hingga mencapai 632 orang dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan mencapai Rp 57.770.272.449,00. Semakin banyak nasabah pembiayaan pada BPRS Haji Miskin tentu menjadi tugas atau tantangan bagi karyawan yang bekerja disana, dengan banyaknya nasabah pembiayaan PNS menjadikan karyawan semakin antusias dalam melayani nasabah.

Dengan begitu resiko yang ditimbulkan juga semakin besar yang disebabkan banyaknya nasabah, resiko yang terjadi berkaitan antara nasabah

dengan bank dikarenakan ada hubungan yang kuat antara nasabah dengan bank, misalnya terjadi kegagalan atau masalah oleh nasabah saat melakukan pembayaran maka akan terjadi risiko operasional bagi bank, walaupun dalam sistem bank pembiayaan nasabah yang baru dicairkan pembiayaan setelah akad akan blok untuk 3 kali pembayaran hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga apabila nasabah gagal memenuhi kewajiban, tapi jika pembiayaan yang diblok sudah mencapai 3 kali bank harus mencari solusi lain untuk mendak lanjuti resiko tersebut, atau terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan bank saat melakukan pemindahan saldo nasabah dan membocorkan identitas nasabah hal ini menjadi risiko utama bagi nasabah dikarenakan dalam pembiayaan PNS ini rekening nasabah akan diserahkan ke bank.

Dari banyaknya resiko yang muncul dan berkaitan antara nasabah dan bank yang menjadi perhatian bagi penulis yaitu resiko yang dialami oleh bank, jika nasabah gagal membayar bisa disebabkan adanya permasalahan di pekerjaan sebagai PNS bank harus serius menangani hal ini dikarenakan tidak ada tanggungan dari pemerintah hal ini disebabkan jaminan yang diberikan nasabah kebanyakan ijazah

pendidikan bukan surat keterangan PNS yang ada tanggungan dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena berupa kata-kata tertulis untuk menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena atau gejala dan situasi sosial tertentu. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, karakteristik penelitian kualitatif diantaranya peneliti memiliki hubungan dekat dengan subjek penelitian, bekerja sama dalam melakukan wawancara, mendeskripsikan secara rinci peristiwa, situasi, fenomena, dan mendahulukan kualitas partisipasi dari pengalaman, artinya penelitian kualitatif lebih memahami atau mendalami tentang suatu objek yang diteliti karena didasari pada pengumpulan data secara langsung, dan orang yang mengalami langsung dalam objek penelitian.

Lokasi dalam Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh yang terletak di Jl Tan Malaka No. 195 Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Waktu penelitian akan

dilakukan pada saat pembuatan skripsi sampai selesai.

Sumber data pertama data primer, adalah data secara langsung diambil/dikumpulkan peneliti, sumber data pada penelitian adalah pimpinan kepala cabang, dan marketing yang bekerja BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh yang memberikan informasi dan data-data mengenai permasalahan yang peneliti teliti. Kedua data sekunder, ialah data yang telah ada sebelumnya dapat digunakan penelitian yang bersangkutan, sumber data sekunder pada penelitian berupa dokumen-dokumen seperti browsur, laporan jumlah nasabah, dan crosscheck kepada karyawan BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan dalam mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan peneliti baik mengenai situasi maupun kondisi, informan adalah orang yang benar-benar tau dan paham tentang masalah yang diteliti. Informan Kunci, dalam penelitian yakni kepala pimpinan cabang BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh. Informan pendukung, dalam penelitian ini karyawan marketing yang bekerja di BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh

Teknik pengumpulan data pada penelitian memakai cara wawancara,

observasi, dan dokumentasi. sedangkan metode analisis data yang digunakan sesuai yang dikemukakan oleh Miles and Huberman terdapat tiga model pada jenis penelitian kualitatif yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dari para pihak terkait dalam manajemen risiko pembiayaan PNS menggunakan rekening sebagai alat pembayaran di PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh. Penelitian ini menjelaskan bagaimana manajemen risiko menangani risiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah di PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh

Risiko merupakan ketidakpastian yang bisa terjadi di waktu sekarang maupun waktu akan datang berupa dampak buruk atau dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Risiko dapat terjadi dari berbagai kemungkinan baik itu risiko yang disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh manusia sendiri. pada perbankan risiko itu muncul ketika ekspektasi yang telah diperhitungkan atau direncanakan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan, contohnya risiko operasional

dimana sebelum turun lapangan semua peralatan sudah diperhatikan secara matang untuk dipraktikkan di lapangan, namun kenyataan ada yang bermasalah setelah di lapangan seperti dari teknisnya atau mesinnya, hal ini yang mengharuskan bank untuk memahami bagaimana cara menanggulangi terjadinya risiko.

Manajemen risiko merupakan langkah awal untuk mengantisipasi dampak negatif yang bisa muncul dari aktifitas usaha bank, pada manajemen risiko yang terpenting dilakukan adalah meminimalisir risiko terjadinya hal negatif pada saat penentuan bagaimana manajemen untuk mengurangi risiko. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko ialah hal penting dari proses penerapan Manajemen Risiko.

1. Pengidentifikasian Risiko

Tahap identifikasi risiko merupakan kegiatan mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang menghambat risiko yang mungkin terjadi. Dalam mengidentifikasi calon nasabah supaya tidak terjadi risiko, maka pihak bank harus memahami kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan apakah nasabah tersebut mampu dan harus mengetahui apakah nasabah mempunyai pembiayaan di bank

lain serta alur atau jalan nasabah dalam membayar pembiayaan apakah ada kendala atau tidak, yaitu dengan mengecek bagian sistem informasi keuangan atau BI Checking. Disana PT BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh dapat mengetahui semua transaksi yang dilakukan nasabah apakah nasabah tersebut memiliki pembiayaan macet atau tidak,

Proses identifikasi lain seperti pengecekan berkas-berkas yang diajukan sebagai syarat melakukan pembiayaan di PT BPRS Haji Miskin. Keaslian jaminan dan berkas harus di check meliputi jaminan SK/ijazah, tanda tangan suami/istri, slip gaji dan lainnya. Dan untuk identifikasi tanda tangan BPRS Haji Miskin tidak hanya mengandalkan kemiripan dengan KTP tetapi juga mewajibkan kehadiran suami dan istri untuk menandatangani pengajuan tersebut di hadapan karyawan bank.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah usaha untuk melihat seberapa besar risiko yang mungkin terjadi. Pengukuran risiko dilakukan untuk melihat lapisan risiko yang dihadap dan dapat melihat pengaruh risiko terhadap bisnis dan dapat memprioritaskan risiko mana yang diutamakan. Hal ini digunakan untuk

menentukan kepentingan relatif dari risiko, untuk memperoleh informasi yang membantu menentukan kombinasi yang tepat dari alat manajemen risiko untuk mengatasinya. Pengukuran yang dilakukan PT BPRS Haji Miskin dari segi karakteristik nasabah seperti sumber pendapatan pasangan suami dan istri, kepastian sertifikasi dari dana sertifikasi atau bukan, dan jika nasabah memiliki penghasilan lain. Selain itu PT BPRS Haji Miskin mengukur kerugian/biaya yang ditanggung bank bila risiko terjadi pada suatu waktu, hal tersebut berhubungan dengan penanggulangan risiko seterusnya karena tanpa melakukan perhitungan dari suatu risiko, proses penanggulangan risiko yang dilakukan bisa salah.

3. Pemantauan Risiko

Proses pemantauan risiko merupakan proses pengamatan dan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil dari pengukuran risiko, apakah pengukuran risiko berjalan seperti yang dilakukan atau malah melenceng disitulah diperlukan pemantauan. Dalam melakukan pemantauan pembiayaan awal bisa dilakukan menggunakan pengecekan rekening Koran/rekening gaji nasabah, saat pembiayaan berlangsung pihak bank hanya menghubungi nasabah setelah

memindahkan saldo dan apabila terjadi ketidak lancaran pembayaran. Selanjutnya pihak bank harus memantau nasabah agar tidak mendownload mobile banking di handphone yang berakibat pada pemindahan saldo yang dilakukan oleh nasabah yang menyebabkan kurang dana untuk pembayaran kewajiban di bank. Jika masih ada yang bermasalah karyawan akan datang menemui nasabah secara langsung selanjutnya menanyakan dengan seksama alasan terjadinya keterlambatan pembayaran pembiayaan, dengan cara ini bank dan nasabah akan mengetahui risiko yang timbul dan akan mencari solusi dari masalah tersebut. Jika masalah nasabah cukup serius maka karyawan akan memberitahukan kepada ketua marketing, dan akan melakukan diskusi dengan ketua marketing

4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko adalah tahap terakhir yang digunakan untuk meminimalisasikan pengaruh dari berlangsungnya risiko melalui usaha berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pihak bank. Pengendalian risiko yang dilakukan dari awal pengajuan berkas, harus benar-benar dianalisis dengan 5C, saat pembiayaan berlangsung jika masih ada nasabah bermasalah sebelum

kolektibilitas dua maka pihak bank akan menghubungi nasabah menanyakan kenapa pembayaran bermasalah atau ada dana yang sudah diambil nasabah sebelum karyawan bank menarik maka nasabah itu akan diberi keluangan waktu untuk membayarnya, kalau sudah mencapai kolektibilitas dua dan nasabah belum menunjukkan etika keinginan melunasi pembayaran, maka akan diberi surat peringatan. Pengendalian risiko pembiayaan yang dilakukan sudah baik dimana pada tahap awal sudah menganalisis risiko yang akan timbul, dari proses pengajuan berkas pembiayaan sampai dengan nasabah melunasi pembayaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data pembiayaan nasabah PNS pada PT BPRS Haji Miskin Cab.Payakumbuh yang peneliti dapatkan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 2

Jumlah nasabah Pembiayaan PNS

Tahun 2021

Jumlah Nasabah PNS	Baki debet	Collectability
93	14.829.551.187	Lancar
21	958.309.432	Dalam perhatian khusus
17	660.083.702	Kurang lancar
9	101.318.237	Diragukan
15	151.414.223	Macet
155	Rp. 16.700.676.781	

Tahun 2022

Jumlah Nasabah PNS	Baki debit	Collectability
128	16.699.119.350	Lancar
39	877.405.667	Dalam perhatian khusus
23	724.823.345	Kurang lancar
20	672.424.663	Diragukan
13	201.034.772	Macet
223	Rp. 19.174.807.797	

Tahun 2023

Jumlah Nasabah PNS	Baki debit	Collectability
130	19.775.454.770	Lancar
52	1.382.292.423	Dalam perhatian khusus
38	862.635.635	Kurang lancar
24	731.583.206	Diragukan
10	142.820.837	Macet
254	Rp. 22.894.786.871	

Sumber : PT. BPRS Haji Miskin Cabang Payakumbuh

Dalam tabel data pembiayaan PNS diatas dapat disimpulkan manajemen risiko yang dilakukan PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh sudah cukup baik, dengan angka kemacetan yang terbilang kecil dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan nasabah yang macet, Dari tabel 2 diatas PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh mengalami peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya dan angka kemacetan berkurang hal ini membuktikan bahwa manajemen risiko yang lakukan PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh cukup baik, tetapi masih harus ditingkatkan lagi untuk mengoptimalkan kerja bank dan menghindari bank dari kerugian. Cara PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh

untuk mengatasi nasabah yang macet atau bermasalah dengan karyawan akan menghubungi nasabah yang bersangkutan menanyakan apa yang menjadi kendala kemacetan pembiayaan yang dilakukan nasabah, selain itu jika nasabah mengalami gagal bayar karena sertifikasi belum cair selain itu ada juga nasabah melakukan pengambilan saldo di rekening sebelum pihak bank ditugaskan penarikan saldo nasabah, pihak bank memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang wanprestasi atau bermasalah dalam pembayaran sebelum masuk kolektibilitas dua untuk melunasi kewajibannya sebelum pihak bank memberikan surat peringatan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah.

Adapun kekurangan yang peneliti lihat selama penelitian adalah dalam usaha pengendalian risiko untuk mengurangi dan menetralkan risiko pada produk pembiayaan sertifikasi guru PNS dengan tidak ada nota perjanjian/kesepakatan yang dilakukan PT BPRS haji Miskin Cab. Payakumbuh bersama bendahara dinas dan bank tidak bekerjasama dengan dinas terkait sertifikasi guru PNS. Hal itu yang menjadi salah satu faktor munculnya risiko pada nasabah pembiayaan PNS di PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh.

Selain manajemen risiko peneliti melihat bagaimana cara meminimalisir risiko operasional kegagalan dan keterlambatan pembayaran akibat ketidaksesuaian jadwal masuk gaji nasabah PNS dengan waktu pemindahan pembayaran ke rekening perusahaan di BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh yaitu dari risiko yang pernah ada atau dialami, penyebab terjadinya risiko, dan langkah-langkah yang diambil PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh untuk mengatasi risiko atau masalah yang terjadi :

1) Risiko yang pernah terjadi

Beberapa risiko yang pernah terjadi di PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh mengenai produk pembiayaan PNS menggunakan rekening sebagai alat pembayaran, diantaranya keterlambatan pembayaran akibat gaji nasabah tidak masuk atau masalah operasional lain yang dihadapi, kedua tidak cukup saldo nasabah di rekening untuk membayar penuh pembiayaan hanya setengah atau lainnya, dan yang ketiga ada kecurangan dari nasabah dimana nasabah memindahkan saldo sebagian ke rekening lain sebelum karyawan bank melakukan pemindahan atau pemotongan saldo untuk pembayaran pembiayaan yang dilakukan. Dari ketiga risiko tersebut yang paling banyak terjadi

adalah keterlambatan pembayaran karena ada kesalahan teknis atau operasional dari sistem gaji, biasanya keterlambatan ini bisa terjadi selang waktu 1 bulan atau 2 bulan. Namun jika risiko yang dialami sudah risiko yang ketiga yaitu nasabah melakukan kecurangan dengan memakai M Banking di handphone dan memindahkan saldo sebelum karyawan melakukan sehingga menyebabkan kekurangan saldo akan berdampak besar terhadap bank.

Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya maka risiko keterlambatan pembayaran akibat gaji terlambat dan masalah lainnya masuk pada jenis risiko Operasional. Risiko operasional merupakan risiko muncul akibat aktivitas operasional perusahaan yang tidak berlangsung sesuai yang seharusnya atau tidak lancar, yang dapat merugikan orang lain.

2) Penyebab terjadi risiko

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh terdapat beberapa penyebab yang melatar belakangi terjadinya risiko diantaranya, Keterlambatan atau terjadinya tunggakan disebabkan oleh pembiayaan sertifikasi yang dilakukan 3 bulan sekali bukan dari masalah pembayaran tetapi dari niat dan

kemampuan nasabah, selain itu disebabkan kesalahan nasabah itu sendiri seperti ada masalah di tempat kerja, bahkan adanya peningkatan dana hidup yang membuat nasabah memakai M Banking untuk memindahkan saldo ke rekening lain sehingga saldo untuk pembayaran pembiayaan tidak cukup. Misalnya pada triwulan 1 terjadi penunggakan 1 bulan oleh nasabah maka hal ini akan berlangsung ke triwulan 2 dan selanjutnya sampai akhir tahun yang menyebabkan kerugian untuk bank.

Dalam penelitian disimpulkan risiko operasional adalah risiko paling sering terjadi dalam kegiatan perusahaan yang menyimpang dari harapan, dengan banyaknya nasabah PNS yang melakukan pembiayaan di BPRS Haji Miskin yang memiliki rekening gaji beragam membuat karyawan susah mencari ATM nasabah yang bersangkutan. Dalam pembiayaan untuk PNS (sertifikasi) risiko yang karyawan bank rasakan yaitu risiko operasional dari segi tempat dimana karyawan menyebutkan kesulitan mencari Bank nasabah sertifikasi yang bersangkutan selain itu adanya atm rusak dan mencari atm lain untuk memindahkan pembiayaan nasabah sertifikasi, dari segi waktu dimana waktu yang dikeluarkan

untuk mengantri dan memindahkan pembiayaan nasabah satu-persatu yang memakan waktu. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan jam kerja karena hanya stak di satu pekerjaan yang memakan cukup banyak waktu yang diperlukan karyawan untuk memproses pembayaran sehingga hal ini mempersulit kerja karyawan.

Selain kendala waktu dan tempat kendala lain seperti gaji nasabah yang belum keluar ataupun saldo nasabah yang belum cukup untuk memenuhi pembiayaan, hal ini pernah terjadi pada PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh waktu pembayaran sertifikasi yang dilakukan 3 bulan sekali maka ada saldo nasabah yang belum mencukupi untuk pembayaran tersebut, dengan hal ini BPRS Haji Miskin mencari cara untuk meminimalisir hal tersebut dengan cara memblokir 3 kali pembayaran saat selesai akad yang disetujui oleh nasabah itu sendiri, jadi jika tidak bisa memenuhi untuk membayar akan digunakan pemblokiran yang pernah dilakukan di awal hingga blokir tersebut habis, akan tetapi pembiayaan tersebut akan lunas pada akhir tahun.

Masalah risiko operasional saat pemindahan saldo pembiayaan nasabah

disebabkan oleh BPRS Yang belum memiliki mesin EDC, mesin EDC adalah perangkat alat pada bank digunakan menerima pembayaran dari nasabah, alat tersebut dapat dipergunakan dalam transaksi antar kartu debit, kartu kredit, dan lainnya. Belum adanya mesin EDC pada BPRS ini yang mengharuskan karyawan pergi ke ATM terdekat untuk melakukan pemindahan saldo pembiayaan nasabah, dengan begitu risiko lain mulai terjadi yaitu seperti di ATM tempat pemindahan saldo nasabah terjadi antrian dan kerusakan ATM yang mengharuskan mencari ATM lain, selain itu karyawan membawa rekening nasabah, mengetahui pin rekening nasabah dan lainnya.

Begitupun nasabah tidak dapat memindahkan saldonya sendiri karena rekening nasabah diletakkan di BPRS Haji Miskin, pemindahan ini dilakukan oleh karyawan atas dasar persetujuan nasabah dengan bank, juga nasabah tidak boleh menginstal Mobile banking di handphone karena dapat beresiko nasabah mengambil saldo di rekening tersebut sehingga saldo untuk pembayaran tidak mencukupi.

3) Langkah-langkah menanggulangi risiko

Menanggulangi risiko merupakan cara PT BPRS Haji Miskin Cab.

Payakumbuh untuk mengurangi, mengatasi, dan menghambat terjadinya risiko yang tidak dapat diprediksi. Berdasarkan hasil yang peneliti temukan disimpulkan sebelum memberikan pembiayaan karyawan BPRS Haji Miskin memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memperhatikan prinsip 5C, melihat Character dan Capacity calon nasabah melalui BI Checking calon nasabah merupakan informasi riwayat kredit debitur yang bersumber dari sistem informasi debitur (SID) yang berisi informasi kredit debitur, yang diakses oleh lembaga keuangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang dilakukan karena ketika pembiayaan sebelumnya yang dilihat pada BI Checking ada yang bermasalah maka kemungkinan pembiayaan tidak akan diproses atau dilakukan. Selanjutnya melihat dari modal yang diperlukan Capital dan Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan nasabah, dimana modal yang bisa diberikan BPRS Haji Miskin Maksimal Rp. 80.000.000,00- dengan agunan Rekening, buku rekening, ijazah terakhir, SK Pendidik dan Akta 4. Jika pembiayaan melebihi nominal yang telah ditentukan maka agunan atau jaminan yang diberikan akan bertambah seperti sertifikat rumah,

BPKB motor/mobil dan lainnya tergantung calon nasabah, selanjutnya condition yaitu kondisi ekonomi calon nasabah dengan melihat dari hasil survey dan slip gaji calon nasabah.

Begitu juga dengan Rekening dan buku rekening nasabah ditahan di BPRS Haji miskin untuk mempermudah nasabah melakukan pembiayaan karena gaji akan langsung dipotong oleh karyawan bank sekaligus untuk mengikat nasabah dengan bank, hal ini dilakukan karena BPRS Haji Miskin belum mempunyai mesin edc untuk memotong langsung pembiayaan nasabah

Selanjutnya cara meminimalisir risiko keterlambatan dan terjadi tunggakan pembayaran oleh nasabah melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku salah satu adanya ketentuan pemblokiran atau pemotongan 3 bulan pembayaran atau 3 kali pembayaran, pemblokiran atau pemotongan ini merupakan pengambilan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selama 3 kali pembayaran, hal ini dilakukan PT BPRS Haji Miskin untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya risiko kegagalan pembayaran, jika terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh nasabah maka dana yang dipotong

setelah akad itu lah yang nantinya akan menggantikan pembayaran pembiayaan nasabah pada bulan yang bersangkutan.

Dalam langkah menanggulangi masalah operasional PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh belum adanya mesin EDC hal ini tidak menghambat bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah PNS, alternatif lain yang BPRS Haji Miskin lakukan adalah dengan memindahkan saldo nasabah PNS ke ATM terdekat dengan aturan rekening yang dibawa karyawan tidak banyak dan dikembalikan setelah pemindahan maupun belum dilakukan pemindahan akibat adanya kesalahan teknis, jika jam kerja telah habis maka pemindahan saldo akan dilanjutkan besok hari dengan karyawan mengembalikan rekening ke kantor sebelum pulang. Sedangkan pembiayaan atau saldo pembayaran angsuran oleh nasabah akan dipindahkan ke buku tabungan nasabah di BPRS Haji Miskin, lalu yang akan dari tabungan tersebut yang nantinya akan dipotong untuk pembiayaannya dalam 3 bulan, jika ada saldo yang tersisa biasanya akan dipindahkan ke tabungan nasabah di BPRS haji Miskin juga dengan nasabah menjemput sisa saldo langsung ke kantor BPRS Haji Miskin atau karyawan bank

akan memindahkan saldo nasabah yang tersisa ke rekening lain yang nasabah miliki selain yang diletakkan di bank.

Penerapan Manajemen Risiko pada pembiayaan PNS menggunakan Rekening sebagai alat pembayaran di PT BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh suatu lembaga keuangan yang rentan terhadap berbagai jenis risiko baik risiko kecil maupun besar. Risiko yang dihadapi PT BPRS Haji Miskin yaitu terjadinya risiko operasional seperti keterlambatan atau terjadinya tunggakan pembayaran oleh nasabah, terjadinya risiko operasional dalam pemindahan saldo pembiayaan nasabah yang rekening nasabah dipegang oleh BPRS Haji Miskin dan pemindahan saldo dilakukan oleh karyawan bank. Dalam menghadapi risiko ini maka PT BPRS Haji Miskin harus menerapkan cara-cara tertentu untuk mengurangi potensi terjadinya risiko.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menangani risiko pembiayaan nasabah PNS, mulai dari manajemen risiko yang diterapkan, risiko yang terjadi dan cara meminimalisir risiko pembiayaan tersebut. Selain itu ada beberapa cara PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh menyikapi permasalahan dan risiko yang terjadi dengan melakukan

penanggulangan risiko pembiayaan PNS hal ini dilakukan secara terstruktur menurut arahan dan panduan perbankan syariah.

Setelah melakukan pengelolaan risiko sebelum memberikan pembiayaan tahap terakhir untuk menanggulangi risiko saat pembiayaan berlangsung dan muncul masalah oleh karena pihak bank harus memilih langkah untuk meminimkan risiko. Ada beberapa langkah/tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yaitu: menghindari risiko, mentransfer risiko, menerima risiko, dan membiarkan risiko.

Adapun penanggulangan risiko yang dilakukan oleh PT BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh supaya memperkecil dampak risiko saat pembiayaan berlangsung dari teori menerima risiko dalam pengelolaan risiko.

1. PT BPRS Haji Miskin Cab Payakumbuh memiliki penanggulangan risiko dengan menerima risiko tersebut karena BPRS Haji Miskin tidak mau menganggap remeh risiko kecil, jika tidak dilakukan apa-apa tentu kan lebih banyak risiko yang bisa membuat BPRS Haji Miskin mengalami kerugian. Pada produk pembiayaan sertifikasi guru PNS

terdapat nasabah yang mengalami risiko pembiayaan dikarenakan oleh ketidakjujuran atau kejahatan yang dilakukan nasabah tersebut.

2. PT BPRS Haji Miskin untuk mengatasi risiko kegagalan pembayaran dikarenakan kejahatan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh nasabah, dengan begitu BPRS akan menanggulangi risiko dengan standar operasional prosedur untuk menangani risiko dengan kegiatan atau tindakan yang telah ditetapkan. Setelah perencanaan, karyawan PT BPRS Haji Miskin akan menghubungi dan menanyakan alasan mengapa nasabah melakukan kegagalan pembayaran dan melakukan kecurangan tersebut, pihak bank akan memberikan waktu dan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi pembiayaan dengan menetapkan batas waktu pelunasan sebelum masuk kolektibilitas dua.
3. Jika nasabah belum juga melakukan pembayaran maka PT BPRS Haji Miskin harus memberikan surat peringatan (SP)1, namun jika nasabah belum memberikan itikad baik untuk melakukan pembayaran maka BPRS akan memberikan surat peringatan

(SP)2, namun jika nasabah masih belum menerima dengan baik hingga surat peringatan (SP)3. Seterusnya pihak bank dengan kepala cabang melakukan pemblokir rekening tabungan nasabah sampai nasabah tidak dapat melakukan kecurangan, dan akan menemui nasabah untuk menanyakan kepastian terhadap pembayaran pembiayaan yang nasabah tersebut lakukan. Namun apabila nasabah tidak menerima pihak bank dengan baik dan mengulangi perbuatan gagal bayar, untuk penyelesaian masalah ini dan untuk menjaga reputasi bank, pihak bank akan melaporkan nasabah kepada pihak yang berwajib.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada judul analisis manajemen risiko pembiayaan PNS menggunakan rekening sebagai alat pembayaran di PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh, peneliti menyimpulkan hasil penelitian manajemen risiko yang digunakan PT BPRS Haji Miskin Cab. Payakumbuh seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko agar mengantisipasi kegagalan pembayaran sudah cukup baik, dilihat dari data pembiayaan PNS pada tabel 2 bahwa

jumlah nasabah pembiayaan yang termasuk dalam col 3, col 4, col 5 masih sedikit, dimana data tersebut dihitung setiap tahun. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah karyawan harus menganalisis kapasitas dan kemampuan nasabah melakukan pembayaran, analisis nilai jaminan harus diperhatikan agar tidak terjadi nya keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh nasabah, Dilihat dari collectability pada pembiayaan PNS dimana kapasitas atau kemampuan nasabah dalam membayar, nilai jaminan, kecurangan yang dilakukan nasabah serta PT BPRS Haji Miskin juga harus melakukan kerjasama dengan bendahara dinas terhubung menjalankan pemotongan gaji yang masuk ke rekening nasabah, yang selanjutnya dijadikan sebagai pembayar pembiayaan nasabah dari pembiayaan sertifikasi guru PNS yang dilakukan kepada PT BPRS Haji Miskin agar terhindar dari kecurangan yang dapat dilakukan oleh nasabah. Setelah melakukan pengelolaan risiko, selain itu langkah terakhir menanggulangi risiko saat pembiayaan berlangsung dan muncul risiko maka pihak bank harus memilih langkah untuk mengurangi risiko. Ada beberapa langkah yang digunakan agar meminimalisir risiko pembiayaan salah

satu yang dilakukan PT BPRS Haji Miskin adalah menerima risiko, karyawan bank akan menghubungi dan menanyakan alasan mengapa nasabah terjadi kegagalan pembayaran, apabila nasabah belum juga melakukan pembayaran maka PT BPRS Haji Miskin akan mengirimkan surat peringatan(SP)1 sampai 3 secara bertahap serta pihak bank akan melaporkan nasabah kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. 2021. *"Manajemen Pembiayaan Bank Syariah"*. Jember : IAIN Jember Press
- Ashibly.2018. *"Hukum Jaminan"*. Bengkulu : MIH Unihaz.
- Ismail. 2011. *"Perbankan syariah"*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ningsih, Supiah. 2021. *"Dampak Dana Pinak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia"*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Usman, Rachmadi. 2009. *"Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia implementasi dan aspek hukuman"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Wangsawidjaja. 2012. *"Pembiayaan Bank syariah"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Akbar, Maulana Falah, Endang Prasetyawati, Menur Pumpungan, and Jawa Timur, 'Legalitas SK Pegawai Negeri Sipil Yang Dijadikan Jaminan Kredit Perbankan', 5, 2024
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023)
- Baba, Mustang Ambo, Analisis Data Penelitian Kualitatif, 2017
- Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa, 'Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Nomor 34 /Seojk.03/2016', 2016
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019)
- Supramono, and . Elsa, 'Peranan Mesin Elektronik Data Capture (Edc) Sebagai Salah Satu Transaksi Pembayaran Elektronik Pada Bank', *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 6.2 (2018)
- Ulpah, Mariya, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Madani Syariah* Vol. 3 No.2 Agustus 2020